

PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ENTERPRISE THEORY

Dori Novarela dan Indah Mulia Sari

*Program Studi Akuntansi Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
Email: dorynovarela@yahoo.co.id*

ABSTRACT

This study aimed to capture the corporate social responsibility (CSR) reporting in Islamic banks in Indonesia in shariah enterprise theory (SET). The SET disclosure items adopted from Meutia (2009) that showed by two accountability dimension, i.e. vertical accountability that directed to Allah swt, and horizontal accountability that directed to three parties i.e direct stakeholders (employee and customer), indirect stakeholders (community), and the universe. The data taken from annual report 2013, processed and analyzed by content analysis. The study found that Bank Muamalat Indonesia is a highest CSR disclosure from ten Islamic banks. For each detail SET, each banks showed the different result. All banks raise the maximum score for the vertical accountability for the highly disclosure.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu institusi yang turut berperan dalam pengungkapan dan pengimplementasian tanggung jawab sosial di dunia bisnis dan posisinya sebagai lembaga keuangan yang sudah diakui keberadaannya ditingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam mengerakkan program Corporate Social Responsibility (CSR) (Samsiyah, 2013:47).

Sebagai entitas syariah, perbankan syariah sepatutnya memiliki dimensi spiritual yang lebih luas, dimana dimensi spiritual ini tidak saja menghendaki praktik bisnis non riba, namun lebih dari itu juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah (Meutia, 2009: 2).

Oleh karena itu perbankan syariah, sebagai entitas yang melandasi operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah, memerlukan sebuah tolak ukur untuk menilai tingkat penerapan CSR yang sesuai dengan visi perbankan syariah yang mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan. Perspektif Syariah Enterprise Theory dinilai sesuai untuk mengukur tingkat penerapan CSR pada perbankan syariah. Karena perspektif ini memandang Allah sebagai sumber amanah utama dan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah, yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Dalam pandangan Syariah Enterprise Theory kepedulian tidak hanya menyangkut kepentingan individu

(dalam hal ini pemegang saham), akan tetapi juga menyangkut kepentingan stakeholders yang lebih luas, meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi. (Triwuyono, 2007:2-5).

Di dalam Al-Qur'an istilah tanggung jawab sosial sering diungkapkan seperti dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah: 205, "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan."

Juga dalam Qs. Al-A'raaf 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi untuk menjaga amanah (sumber daya alam) yang diberikan-Nya. Sehingga dalam menjalankan usahanya baik yang berhubungan langsung dengan alam maupun tidak, manusia harus tetap memperhatikan kondisi alam dan lingkungan dimanapun ia berada.

Kemudian pada aspek kepedulian terhadap sesama manusia, Islam juga sangat menganjurkan kepada manusia untuk saling berbagi, peduli dan saling menolong antar sesama dengan berbagai cara seperti infaq, sedekah, zakat dan lainnya. Allah berfirman dalam Qs. At-Taghabun 16 "...dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Penelitian tentang CSR telah banyak dilakukan, namun yang membahas tentang CSR berdasarkan perspektif syariah enterprise theory masih terbatas. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Mansur (2012) tentang pengungkapan CSR pada perbankan syariah yang menemukan bahwa bank syariah yang dijadikan objek penelitian masih sangat terbatas, bersifat sukarela, serta masih jauh dari kesesuaian dengan syariah enterprise theory.

Maka dari itu penelitian tentang penilaian CSR perbankan syariah dengan perspektif bisnis syariah sebagai landasan teori masih perlu dikembangkan agar proses diseminasi perspektif syariah enterprise theory dalam implementasi tanggung jawab sosial pada perbankan syariah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah berdasarkan Syariah Enterprise Theory dengan berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah berdasarkan perspektif syariah enterprise theory.

2. LANDASAN TEORI

2.1 CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Davis dan Frederick pada tahun 1992 menyatakan CSR sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. (Azheri, 2012:27)

Corporate Social Responsibility adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan (Ningsih 2012). Secara umum CSR dimaknai sebagai sebuah cara dengan mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (Ningsih 2012).

2.2 SYARIAH ENTERPRISE THEORY (SET)

Syariah Enterprise Theory (SET) merupakan Enterprise Theory (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas. Berbeda dengan entity theory yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik (Meutia, 2009:40).

Triyuwono (2007:4) menyatakan bahwa Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas, SET meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia.

Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia, yang dibedakan antara direct-stakeholders dan indirect-stakeholders. Direct-stakeholders adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-keuangan (nonfinancial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapat kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak yang sama sekali

tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

2.3 ITEM PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Menurut Meutia (2009) terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh syariah enterprise theory dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut syariah enterprise theory adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu direct stakeholders, indirect stakeholders, dan alam. Pihak-pihak yang disebut direct stakeholders adalah nasabah dan karyawan, sedangkan pihak yang termasuk indirect stakeholders adalah komunitas.

Direct stakeholders (Nasabah). Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan, dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang.

Direct stakeholders (Karyawan). Item yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non-diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir.

Indirect stakeholders (Komunitas). Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada indirect stakeholders, dalam hal ini komunitas, adalah adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat

luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

Item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.

2.4 CSR PADA PERBANKAN SYARIAH

Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-nilai spiritual, di mana terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah menjadi salah satu konsekuensi dari nilai spiritual tersebut. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial.

Bank Syariah sudah seharusnya melakukan kegiatan CSR sebagai bagian dari kegiatan bisnis yang melaksanakan tujuan sustainability Bank Syariah, lingkungan dan komunitas di sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam UU No.40/2007.

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) (Wiroso, 2009). Adanya fungsi sosial ini membuat bank syariah secara alamiah sudah diinjeksi program corporate social responsibility (CSR).

2.5 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian Suwarni, 2008, tentang Implementasi CSR dalam Islam dan Berbagai Jenis Bisnis, ditemukan bahwa implementasi CSR pada perusahaan di Indonesia pada umumnya dan pada perusahaan sampel khususnya, mengalami pergeseran niat dari pembayaran rasa bersalah atas perilaku bisnis yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, ke promosi perusahaan/produk serta keringanan pajak. Semua perusahaan sampel sudah melaksanakan CSR, baik sebagai kewajiban secara internal maupun eksternal dan sebagai kemampuan untuk ikut membantukemandirian masyarakat sekitar walaupun masih ada unsur promosi atas perusahaan maupun produknya.

Penelitian Purwitasari, 2011 tentang Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank

Muamalat Indonesia, menunjukkan bahwa tindakan pelaporan tanggung jawab sosial oleh BSM dan BMI masih dipengaruhi oleh kepentingan mereka masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini terutama dipengaruhi oleh money dan power. Peranan 'prinsip' tidak terlalu terlihat dalam cara pelaporan tanggung jawab sosial mereka.

Erwanda, 2011, juga meneliti Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Malang). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, tanggung jawab sosial BNI Syariah Cabang Malang dilaporkan hanya pada aspek sosial khususnya pendidikan dan belum melaporkan kegiatannya pada aspek ekonomi maupun lingkungan.

Penelitian Mansur, 2012, tentang Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif Syariah Enterprise Theory menemukan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial Bank Syariah Mandiri masih sangat terbatas, secara sukarela, serta masih jauh dari kesesuaian dengan Syariah Enterprise Theory.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau Content Analysis, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan kinerja sosial bank syariah di Indonesia berdasarkan Syariah Enterprise Theory melalui analisis isi laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS).

3.2 JENIS DATA PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data Corporate Social Responsibility (CSR) Annual Report Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2013.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL

Dari populasi seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, dipilih sampel berdasarkan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi pada tahun 2013
2. Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mempublikasikan laporan tahunan periode 2013 di website resmi masing-masing BUS.

Berdasarkan penilaian peneliti, maka jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria sampel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Sampel Penelitian

No	Sampel	Jumlah
1	BUS yang beroperasi di Indonesia tahun 2013	11
2	Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak mempublikasi	(1)

laporan tahunan periode 2013 di website masing-masing		
3	Total sampel yang memenuhi kriteria	10

Sumber: diolah oleh peneliti, 2014

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

1. Menentukan Item Pengungkapan Syariah Enterprise Theory (SET)

Item pengungkapan SET diadopsi dari penelitian Meutia (2009) yang dikembangkan dari dua dimensi akuntabilitas yaitu, akuntabilitas vertikal yang ditujukan hanya kepada Allah swt, dan akuntabilitas horizontal yang ditujukan kepada tiga pihak, yaitu direct stakeholders(karyawan dan nasabah), indirect stakeholders(komunitas), dan alam.

Tabel dibawah ini merupakan perincian item-item CSR yang yang terdapat dalam SET.

No	Item pelaporan set	Skor
1	Akuntabilitas vertikal (Allah SWT)	
A	Adanya opini DPS	1
B	Pelaporan mengenai fatwa aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi	1
2	Akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) nasabah	
A	Adanya pelaporan kualifikasi dan pengalaman anggota dewan pengawas syariah (DPS)	1
B	Laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan	1
C	Informasi produk dan konsep syariah	1
D	Jumlah pembiayaan	1
E	Penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk transaksi non-syariah	1
3	Akuntabilitas horizontal (direct stakeholders) karyawan	
A	Pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi	1
B	Kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan	1
C	Ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan	1
D	Fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.	1
4	Akuntabilitas horizontal (indirect stakeholders) komunitas	
A	Pelaporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam	1
B	Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan ham	1
C	Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak	1
D	Kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan	1

5	Akuntabilitas horizontal kepada alam	
A	Pelaporan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara	1
B	Menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan	1
C	Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.	1
D	Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon)	1
E	Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi	1
F	Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.	1
	Total	21

Sumber: Meutia (2009)

2. Melakukan Skoring

Setelah menentukan komponen SET, dilakukan skoring SET pada BUS, yaitu dengan memberikan skor pada setiap item SET yang diungkapkan pada laporan tahunan BUS. Jika terdapat sub-tema yang diungkapkan maka akan mendapat skor "1", dan jika tidak maka akan mendapat skor "0". Jika seluruh sub-tema diungkapkan akan memperoleh skor "21".

3. Melakukan Analisis dan Penilaian

Setelah dilakukan proses skoring SET pada tiap-tiap BUS, pada bagian pertama akan dilakukan analisis terhadap tiap-tiap item SET pada setiap BUS untuk mengetahui tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS. Selanjutnya dilakukan penilaian secara kumulatif SET pada Bank Umum Syariah (BUS) yang akan menentukan tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan SET pada setiap tema SET atau secara kumulatif digunakan rumus sebagai berikut:

$$SET = \frac{\text{Jumlah Poin yang diungkapkan}}{\text{Jumlah Skor Maksimal}} \cdot 100\%$$

4. Memberikan predikat CSR masing-masing BUS

Setelah diketahui nilai SET pada tiap-tiap item, akan ditentukan predikat tingkat pengungkapan kinerja sosial masing-masing BUS. Dalam penilaian tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS, penulis menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Munawaroh (2007) dan Gustani (2012), dimana skor pengungkapan diklasifikasikan dalam 4 kategori: Sangat Informatif (81-100), cukup Informatif (66-<81), Kurang informatif (51-<66) dan tidak informatif (0-<51).

Tabel 3. Predikat Tingkat Pengungkapan Sosial bank Syariah

Predikat	Nilai Indeks (%)
Sangat Informatif	81 s/d 100

Informatif	66 s/d <81
Kurang Informatif	51 s/d <66
Tidak Informatif	0 s/d <51

Sumber: Sigit pramono (2005) dalam Munawaroh (2007), dan Gustani (2012)

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK SYARIAH BERDASARKAN DIMENSI INDEKS SYARIAH ENTERPRISE THEORY

Pada bagian ini akan dilakukan analisis dari hasil penghitungan indeks SET pada 10 BUS tahun 2013. Analisis akan dilakukan terhadap setiap dimensi indeks SET pada tiap-tiap BUS. Dimensi dimaksud mencakup akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal kepada direct stakeholder yaitu nasabah dan karyawan dan indirect stakeholder yaitu komunitas dan alam.

Berikut ini skor indeks SET setiap BUS berdasarkan dimensi atau sub-item pengungkapan SET.

No	Sub-Item Pengungkapan	Skor SET 2013										Rata2	
		BMI	BSM	BMS	BRIS	BSB	BNIS	BJBS	BPS	BCAS	BVS		
1	Allah SWT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nasabah	100%	80%	60%	100%	100%	100%	40%	100%	40%	80%	80%	
3	Karyawan	100%	100%	75%	75%	100%	75%	25%	75%	25%	25%	68%	
4	Komunitas	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	50%	75%	90%	
5	Alam	50%	50%	0%	16.7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	

5.1.1 Akuntabilitas Vertikal (Allah)

Penilaian akuntabilitas kepada Allah terdiri dari 2 item penilaian yaitu opini DPS dan pelaporan mengenai kepatuhan terhadap fatwa dalam aspek operasional perbankan syariah. Berdasarkan hasil penghitungan skor indeks dimensi akuntabilitas vertikal (Allah), kesepuluh bank syariah yang menjadi sampel penelitian ini mendapatkan nilai maksimal 100% (sangat informatif). Hal ini menunjukkan upaya BUS dalam memenuhi prinsip kepatuhan terhadap fatwa syariah baik dalam produk maupun aspek operasional.

5.1.2 Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholders) Nasabah

Penilaian horizontal terhadap nasabah dilakukan dengan 5 (lima) sub-item yaitu pelaporan tentang kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan, informasi produk dan konsep syariah, jumlah pembiayaan, dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk transaksi non syariah.

Dari hasil penghitungan, terdapat 5 BUS yang memperoleh nilai tertinggi 100% yaitu BMI, BRIS, BSB, BNIS, dan BPS. Kelima BUS ini mendapat predikat sangat informatif dengan menyajikan kelima sub-item

pelaporan seperti tersebut di atas. Nilai tertinggi berikutnya dicapai oleh BSM dan BVS dengan skor 80% dengan predikat informatif. Kedua BUS mengungkapkan empat dari lima sub-item pengungkapan. Berikutnya terdapat 1 BUS yang mendapatkan nilai 60% dengan hanya melaporkan 3 dari 5 sub-item pengungkapan dan mendapatkan predikat kurang informatif. Sementara sisanya 2 BUS yang hanya melaporkan 2 sub-item dengan nilai 40% dan predikat tidak informatif.

Pada sub-item kebijakan untuk transaksi non syariah BMI melaporkan bahwa pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (Qardhul Hasan). Pada sub-item lainnya, yaitu laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan, BMI mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Pada dimensi ini terdapat 2 BUS yang hanya mengungkapkan empat dari limasub-item, yaitu BSM dan BVS. Sub-item pelaporan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dilaporkan oleh BSM, sementara BVS tidak mengungkapkan sub-item kebijakan/usaha untuk transaksi nonsyariah.

Berikutnya BMS tidak melaporkan 2 sub-item, yaitu sub-item laporan dana zakat dan qardhul hasan dan sub-item kebijakan/usaha untuk transaksi nonsyariah. Sedangkan 2 BUS yang tidak mengungkapkan 3 sub-item yaitu sub-item laporan dana zakat dan qardhul hasan, sub-item informasi produk dan konsep syariah, dan sub-item kebijakan/usaha untuk transaksi nonsyariah adalah BJBS dan BCAS.

Dalam penelitian ini terdapat satu sub-item yang selalu diungkapkan oleh seluruh BUS, yaitu jumlah pembiayaan. Secara keseluruhan tingkat pengungkapan CSR BUS pada sub-item akuntabilitas terhadap nasabah adalah informatif karena memiliki skor 80%.

5.1.3 Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholders) Karyawan

Penilaian horizontal terhadap karyawan ini dilakukan dengan 4 (empat) sub-item yaitu pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan, ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan, dan fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.

Dari hasil penilaian terhadap akuntabilitas horizontal karyawan, terdapat 3 BUS yang mendapatkan nilai 100% dengan predikat sangat informatif, yaitu BMI, BSM, dan BSB. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga BUS memiliki perhatian yang optimal terhadap penerapan sistem remunerasi yang menyesuaikan dengan faktor kenaikan biaya hidup (inflasi) dan kemampuan entitasnya. Termasuk dalam peningkatan layanan kesehatan bagi karyawan, anggaran Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja untuk karyawan. Dalam upaya meningkatkan produktivitas karyawan BUS mengadakan berbagai program pelatihan dan pendidikan. Fasilitas juga diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan

khusus. Selain itu BUS juga memberikan layanan konsultasi pengelolaan keuangan yang baik bagi pegawai.

Adapun BUS yang mendapat predikat informatif dengan skor 75% adalah BMS, BRIS, BNIS, dan BPS. Keempat BUS melaporkan empat dari lima sub-item akuntabilitas terhadap karyawan. Sub-item yang tidak dilaporkan adalah fasilitas beasiswa dan pembiayaan khusus kepada keluarga karyawan.

Berikutnya BUS yang mendapatkan nilai 25% dengan hanya melaporkan kebijakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas karyawan adalah BJBS, BCAS, dan BVS sehingga mendapatkan predikat tidak informatif.

5.1.4 Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholders) Komunitas

Pada item akuntabilitas horizontal terhadap komunitas terdapat 4 (empat) sub-item, yaitu pelaporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

Pada penilaian akuntabilitas kepada komunitas ini, predikat sangat informatif mendominasi hasil penilaian keseluruhan BUS. Dari 10 BUS terdapat 7 BUS yang mendapatkan skor 100%, hal ini menunjukkan tingginya inisiatif BUS dalam upaya meningkatkan akses masyarakat atas jasa keuangan bank Islam secara lebih luas dan menyediakan media pelaporan keuangan dan non keuangan bank baik melalui pengembangan website BUS untuk kepentingan pengguna eksternal maupun Core Banking System yang ditujukan bagi kepentingan internal bank.

Hanya 3 BUS yang tidak melaporkan secara lengkap sub-item akuntabilitas kepada komunitas, yaitu BRIS dan BVS yang masing-masing tidak melaporkan sub-item inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam dan sub-item kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Kedua BUS melaporkan 3 dari 4 sub-item dan mendapatkan skor 75% dengan predikat informative. Sementara BUS yang mendapatkan skor 50% dan mendapat predikat tidak informative hanya 1 BUS, yaitu BCAS yang tidak melaporkan sub-item inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam dan sub-item kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM.

5.1.5 Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholders) Alam

Berkebalikan dengan hasil penilaian akuntabilitas kepada Komunitas, hasil penilaian akuntabilitas kepada alam menunjukkan bahwa seluruh BUS mendapatkan predikat tidak informatif. Di mana 7 dari 10 BUS tidak melaporkan satu pun sub-item yang menjadi penilaian dalam akuntabilitas terhadap alam. Hanya 2 BUS yang melaporkan 3 sub-item dan 1 BUS

melaporkan 2 sub-item. 2 sub-item yang paling banyak dilaporkan adalah kontribusi langsung terhadap lingkungan dan kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi, suatu bentuk akuntabilitas kepada lingkungan yang biasa didukung oleh entitas pada umumnya. Sementara sub-item yang memiliki nilai kekhasan dari operasi perbankan yang terkait dengan akuntabilitas kepada alam baru dilakukan oleh BMI, yaitu kebijakan pembiayaan yang memperhatikan isu-isu lingkungan.

Dengan demikian upaya bank syariah untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan melalui kebijakan pembiayaan kepada organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan belum optimal, walaupun bank syariah tidak melaporkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

5.2 TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KUMULATIF BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS SET

Pada bagian ini akan ditentukan tingkat pengungkapan CSR BUS berdasarkan indeks SET secara kumulatif. Tingkat pengungkapan CSR BUS mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan pada bagian metodologi penelitian, yaitu predikat Sangat Informatif memiliki nilai indeks 81% s/d 100%, predikat Informatif memiliki nilai indeks 66% s/d <81%, predikat Kurang Informatif nilai indeks 51% s/d <66%, dan predikat Tidak Informatif memiliki nilai indeks 0% s/d <51%.

Berdasarkan hasil skoring SET pada BUS pada tahun 2013 diperoleh poin dan nilai SET pada masing-masing BUS, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Kumulatif BUS Berdasarkan SET tahun 2013

No	Nama BUS	Poin	Nilai
1	BMI	18	86%
2	BSM	17	81%
3	BSB	15	71,40%
4	BRIS	14	67%
5	BPS	14	67%
6	BNIS	14	67%
7	BMS	12	57%
8	BVS	10	47%
9	BJBS	9	43%
10	BCAS	7	33%

Sumber: data sekunder diolah

Dari hasil penghitungan tingkat pengungkapan CSR BUS berdasarkan indeks SET secara kumulatif pada tahun 2013, ditemukan bahwa BMI adalah BUS yang memiliki tingkat pengungkapan CSR tertinggi dengan skor 86%,

disusul BSM dengan skor sebesar 81%, sedangkan BCAS mendapatkan skor terendah sebesar 33%. Secara predikat tingkat pengungkapan CSR BUS, BMI dan BSM mendapatkan predikat Sangat Informatif karena memperoleh skor SET diantara 81% s/d 100%, sedangkan BSB, BRIS, BPS, dan BNIS memperoleh predikat Informatif karena perolehan nilai indeks-nya diantara 66% s/d <81%. Sementara BMS memperoleh predikat Kurang Informatif karena memperoleh nilai indeks diantara 51% s/d <66%.BVS, BJBS, dan BCAS mendapatkan predikat Tidak Informatif karena memiliki nilai indeks diantara 0% s/d <51%.

Table 5 Predikat Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Kumulatif BUS Berdasarkan SET

No	Nama BUS	Predikat
1	BMI	Sangat informative
2	BSM	Sangat informative
3	BSB	Informatif
4	BRIS	Informatif
5	BPS	Informatif
6	BNIS	Informatif
7	BMS	Kurang informatif
8	BVS	Tidak informatif
9	BJBS	Tidak informatif
10	BCAS	Tidak informatif

Sumber: data sekunder diolah

Dari predikat tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan CSR yang paling baik diantara Sembilan BUS yang jadi sampel adalah BMI disusul BSM, BSB, BRIS, BPS, BNIS, BMS, BVS, BJBS dan BCAS.

6. KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perbankan syariah dalam perspektif syariah enterprise theory (SET) pada tahun 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sepuluh BUS yang diteliti yang memiliki tingkat pengungkapan CSR tertinggi adalah BMI.

Pada setiap sub-item SET tiap-tiap BUS menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas vertikal-Allah semua BUS mendapat skor maksimal yaitu sangat informatif. Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-nasabah, BMI, BRIS, BSB, BNIS dan BPS mendapat skor tertinggi yaitu sangat informatif. Sedangkan BJBS, BCAS mendapat skor terendah yaitu tidak informatif.

Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-karyawan, BMI, BSM, dan BSB mendapat skor tertinggi yaitu sangat informatif. Sedangkan BJBS, BCAS dan BVS mendapat skor terendah yaitu tidak informatif.

Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-komunitas BMI, BSM, BMS, BSB, BNIS, BJBS dan BPS mendapat skor tertinggi yaitu sangat informatif. Sedangkan BCAS mendapat skor terendah yaitu tidak informatif.

Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan SET pada item akuntabilitas horizontal-alam tidak ada satupun BUS yang maksimal dalam pengungkapannya, semua BUS mendapat skor rendah yaitu tidak informatif. Hal ini dikarenakan BUS lebih memfokuskan kegiatan CSR pada pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu karena BUS juga tidak memberikan dampak negatif langsung pada lingkungan dan alam yang ada disekitarnya sehingga kontribusi BUS masih kurang terhadap item akuntabilitas horizontal-alam.

6. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim, Departemen Agama RI.

Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persaja.

Bank Mega Syariah. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 Bank Mega Syariah. Dipetik Oktober 4, 2014, dari Situs Resmi Bank Mega Syariah: www.bsmi.co.id

Bank Muamalat Indonesia. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan Bank Muamalat. Dipetik Oktober 2, 2014, dari Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia: <http://www.muamalatbank.com>

Bank Panin Syariah. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 Bank Panin Syariah. Dipetik Oktober 10, 2014, dari Situs Resmi Bank Panin Syariah: www.paninbanksyariah.co.id

Bank Syariah Bukopin. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 Bank Syariah Bukopin. Dipetik Oktober 8, 2014, dari Situs Resmi Bank Syariah Bukopin: www.syariahbukopin.co.id

Bank Syariah Mandiri. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 Bank Syariah Mandiri. Dipetik Oktober 3, 2014, dari Situs Resmi Bank Syariah Mandiri: www.syariahmandiri.co.id

Bank Victoria Syariah. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 Bank Victoria Syariah. Dipetik Oktober 9, 2014, dari Situs Resmi Bank Victoria Syariah: www.syariahbukopin.co.id

- BCA Syariah. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 BCA Syariah. Dipetik Oktober 5, 2014, dari Situs Resmi BCA Syariah: www.bcasyariah.co.id
- BJB Syariah. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 BJB Syariah. Dipetik Oktober 7, 2014, dari Situs Resmi BJB Syariah: bjbsyariah.co.id
- BNI Syariah. (2013, Desember 31). Laporan tahunan 2013 BNI Syariah. Dipetik Oktober 1, 2014, dari Situs Resmi BNI Syariah: <http://www.bnisyariah.co.id>
- BRI Syariah. (2013, Desember 31). Laporan Tahunan 2013 BRI Syariah. Dipetik Oktober 6, 2014, dari Situs Resmi BRI Syariah: www.brisyariah.co.id
- Erwanda, E. 2011. Tanggung Jawab Sosial Pada Organisasi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Malang). Universitas Brawijaya.
- Gustani.(2013). Analisis Tingkat Pengungkapan Kinerja Sosial Bank Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR). STEI SEBI.
- Mansur, S. 2012. Pelaporan corporate social responsibility perbankan syariah dalam perspektif syariah enterprise theory (studi kasus pada laporan tahunan pt syariah mandiri).Universitas Hasanuddin
- Meutia, I. 2009.Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah.Universitas Brawijaya Malang.
- Munawaroh.(2007). Analisa kecukupan Informasi Atas Penyajian dan Pengungkapan Laporan Tahunan BAZNAZ Periode 2003-2005. STEI SEBI.
- Ningsih, S. (2012).Pengaruh Corporate Social ResponsibilityDan Kinerja Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. Jurnal Skripsi.
- Purwitasari, F. (2011).Analisis pelaporan CSR perbankan syariah dalam perspektif syariah enterprice theory. Universitas diponegoro semarang.
- Suwarni, A.T. 2008.Implementasi CSR dalam islam dan berbagai jenis bisnis. Universitas Muhammadiyah prof. dr. hamka
- Triyuwono, I. Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas, 26-28 Juli 2007. 1-21.
- Undang-Undang No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.